

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan 4
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET



KELOMPOK	:	2
NAMA PESERTA	:	MANSUR HIDAYAT
NOMER PESERTA	:	2001500505144

**RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN**

Sekolah : SMP NU 07 BRANGSONG
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : IX / I GANJIL
Kompetensi Dasar : KD.3.1.3 MENELAHAH HAKIKAT DAN BENTUK KEDAULATAN
Materi : Definisi,Bentuk ,sifat kedaulatan negara

Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran/tatap muka

KOMPETENSI INTI : 1. . Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. . Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. . Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. . Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah kongkret (menggunakan, mengurai, merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang / teori

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui model pembelajaran Problem Based Learning peserta didik dapat menelaah hakikat bentuk dan kedaulatan negara
2. Siswa mampu mempresentasikan hakikat ,prinsip, dan sifat kedaulatan setelah menyimak video youtube <https://youtu.be/34459p58ox8> dan diskusi

B. MEDIA PEMBELAJARAN

Alat/ Bahan : Laptop, Smartphone, jaringan internet, headset

C. SUMBER BELAJAR

Sumber Belajar :1. buku siswa PPKn kelas IX kementerian Pendidikan tahun 2017

2. buku sejarah nasional Indonesia,(zaman jepang dan zaman republic)

3. youtube <https://youtu.be/34459p58ox8>

4. buku guru PPKn kelas IX kementerian Pendidikan tahun 2017

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN:

1. Pendahuluan

Guru :

- Melakukan pembukan dengan mengucap salam
- Mengajak siswa berdoa dengan dipimpin salah satu siswa
- Mengabsen kehadiran siswa sebagai sikap disiplin
- Mengajak siswa bernyanyi “Indonesia tanah air beta’ sebagai wujud cinta tanah air
- Menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran materi “hakikat kedaulatan, sifat kedaulatan, bentuk kedaulatan” dengan menyimak ppt dan video youtube <https://youtu.be/34459p58ox8>
-
- Menjelaskan hal- hal yang akan di capai serta metode belajar yang akan di ikuti.

2. KEGIATAN INTI

LITERASI

- Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliska Kembali ,mereka di beri tayangan youtube yang berkaitan dengan materi materi “hakikat kedaulatan, sifat kedaulatan, bentuk kedaulatan” dengan menyimak ppt dan video youtube <https://youtu.be/34459p58ox8>

CRITICAL TINKING

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi :

1. Apa arti dari kedaulatan?
2. Dengan apa kedaulatan negara di laksanakan dan wujud dari kedaulatan rakyat?
3. Materi yang belum di pahami

COLABORATION Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan UUD 1945

COMUNICATION Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan

- Guru dan peserta didik membuat kesimpulan terkait materi “hakikat kedaulatan, sifat kedaulatan, bentuk kedaulatan” dengan menyimak ppt dan video youtube <https://youtu.be/34459p58ox8> dalam presentasi , dll

3. KEGIATAN PENUTUP

- Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja terbaik
- Guru menyampaikan penugasan dalam rangka evaluasi pembelajaran serta materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya
- Guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa
- Dan selalu mengingatkan pakai masker jika keluar rumah

E. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

1. Penilaian Kompetensi Sikap

Teknik penilaian kompetensi sikap menggunakan teknik penilaian pengamatan sikap dengan Jurnal Penilaian sikap (Terlampir)

2. Penilaian Pengetahuan

Berupa tes tertulis pilihan ganda dengan integrasi Google Spreadsheet, tes lisan / observasi terhadap diskusi tanya jawab dan percakapan serta penugasan (Terlampir)

3. Penilaian Keterampilan berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk dan penilaian portofolio (Terlampir)

<p>Mengetahui Kepala SMP NU 07 Brangsong</p> <p>Drs. Nasron</p>	<p>Kedal 25 November 2021 Guru Mata Pelajaran</p> <p>Mansur Hidayat,S.Pd</p>
--	--



--	--

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bahan Ajar

Sekolah	:	SMP NU 07 BRANGSONG
Mata Pelajaran	:	PPKn
Kelas/Semester	:	IX/1 GANJIL
Kompetensi Dasar	:	2.3 Memahami ketentuan tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai UUD NKRI tahun 1945
Materi	:	Ketentuan bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan UUD 1945
Alokasi Waktu	:	3 Jam Pelajaran
Kompetensi Dasar		Indikator Pencapaian Kompetensi
2.3 Memahami ketentuan tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai UUD NKRI tahun 1945		Peserta didik dapat menjelaskan bentuk dan kedaulatan negara Indonesia

MATERI AJAR

HAKIKAT , SIFAT DAN BENTUK KEDAULATAN



Kata kedaulatan berasal dari bahasa arab, yaitu "daulah" yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedaulatan rakyat, berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat, mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada, diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan "demokrasi". Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.

Menurut penguapit Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki empat sifat pokok, yaitu:

- a. asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi;
- b. permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti;
- c. tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain; serta
- d. tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.

Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan, berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain. Adanya pemerintahan yang berdaulat, merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara *de facto*, di samping harus memiliki rakyat, dan wilayah.

Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.

- a. Kedaulatan ke dalam, berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
- b. Kedaulatan ke luar, berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan ke luar, antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya.



Sumber: <http://gdb.voanews.com>

Gambar 3.2 Perjanjian antarnegara

2. Teori Kedaulatan

Tahukah kalian, siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori-teori kedaulatan tersebut, di antaranya sebagai berikut.



a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu (*causa prima*). Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrati ditetapkan-Nya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya, para raja Mesir Kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda (*Bidde Gratec Gods*, kehendak

Tuhan), dan Raja Ethiopia (Haile Selasi, singa penakluk dari suku Yuda pilihan Tuhan). Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan dewa Wisnu. Ken Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahma, Wisnu, dan Syiwa sekaligus.

Pelopop teori kedaulatan Tuhan, antara lain, Augustinus (354-430), Thomas Aquino (1215-1274), F. Hegel (1770-1831), dan F.J. Stahl (1802-1861). Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan kaisar *Tenno Heika* sebagai titisan Dewa Matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah.

b. Teori Kedaulatan Raja

Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai *representasi* atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya.

Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli (1467-1527) melalui karyanya, *II Principe*. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Namun, raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antarbangsa, dan konstitusi kerajaan (*leges imperii*). Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobes (1588-1679) yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari *homo homini lupus*. Teori kedaulatan raja, beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Raja Louis XIV dari Prancis dengan sombongnya berkata "*l'etat C'st Moi*" (negara adalah saya).

c. Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga

tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator.

Peletak dasar teori ini antara lain, Jean Bodin (1530-1596), F. Hegel (1770-1831), G. Jellinek (1851-1911), dan Paul Laband (1879-1958). Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis.

d. Teori Kedaulatan Hukum

Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai "panglima", mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum, diantaranya: Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguit.

e. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah *Montesquieu* (1688-1755) dan *J.J. Rousseau* (1712-1778).

Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat, di antaranya sebagai berikut.

- 1) J.J. Rousseau, menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat (*social contract*).
- 2) Johannes Althusius, menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia, terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat.
- 3) John Locke, menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah

mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui:

- a) *pactum unionis*, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara; dan
 - b) *pactum subjectionis*, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau UUD.
- 4) Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah (*separated of power*). Pemegang kekuasaan yang satu, tidak memengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara, dibagi atas tiga kekuasaan, yaitu:
- a) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara,
 - b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan, dan
 - c) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.

Lampiran 2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Sekolah	:	SMP NU 07 BRANGSONG KENDAL															
Mata Pelajaran	:	PPKn															
Kelas/Semester	:	IX/1 GANJIL															
Kompetensi Dasar	:	2.3 Komitmen dan semangat kebangsaan pendiri Negara UUD 1945															
Materi	:	Bentuk Kedaulatan Negara Sesuai Dengan Ketentuan UUD 1945															
Alokasi Waktu	:	40 m X 3 Jam Pelajaran/ tapka															
Kompetensi Dasar		Indikator Pencapaian Kompetensi															
2.3 Memahami ketentuan tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai UUD NKRI tahun 1945		Peserta didik dapat menjelaskan bentuk dan kedaulatan negara Indonesia															
Tujuan Lembar Kerja Peserta Didik : Peserta didik dapat menjelaskan bentuk dan kedaulatan negara Indonesia																	
Informasi Pendukung 4. internet																	
Petunjuk Pengerjaan 1. awali dengan berdoa! 2. baca dengan cermat soal-soal yang di kerjakan.!																	
<p>Tugas Mandiri 3.1</p> <p>Setelah kalian mencari informasi dengan membaca materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat kedaulatan, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Aspek Informasi</th> <th>Uraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengertian kedaulatan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sifat kedaulatan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Macam kedaulatan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Teori kedaulatan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No.	Aspek Informasi	Uraian	1.	Pengertian kedaulatan		2.	Sifat kedaulatan		3.	Macam kedaulatan		4.	Teori kedaulatan	
No.	Aspek Informasi	Uraian															
1.	Pengertian kedaulatan																
2.	Sifat kedaulatan																
3.	Macam kedaulatan																
4.	Teori kedaulatan																

Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian dilakukan dengan pengamatan langsung kepada peserta didik dengan mencatat kejadian yang luar biasa, baik kejadian yang sifatnya positif maupun negatif pada lembar Jurnal perkembangan sikap peserta didik seperti pada contoh tabel di bawah ini.

Jurnal Perkembangan Sikap peserta didik

No.	Tanggal	Nama Peserta Didik	Catatan Perilaku	Butir Sikap
1.				
2.				
3.				

Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran, serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil telaah tentang Semangat dan Komitmen Kebangsaan Pendiri Negara. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru

No	Nama siswa	Kemampuan menjawab	Kemampuan bertanya	Kemampuan berpendapat	Mengapresiasi

Keterangan: di isi dengan tanda nilai angka

Kategori Penilaian: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Pedoman Penskoran (rubrik)

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya
		Skor 3, apabila sering bertanya
		Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya
		Skor 1, apabila tidak pernah bertanya
2	Kemampuan	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan

	menjawab/	jelas.
	Argumentasi	Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas
		Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas
		Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan memberi Masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan
		Skor 3, apabila sering memberi masukan
		Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan
		Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan
4	Mengapresiasi	Skor 4, apabila selalu memberikan pujian
		Skor 3, apabila sering memberikan pujian
		Skor 2, apabila kadang-kadang memberi pujian
		Skor 1, apabila tidak pernah memberi pujian

Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk mengerjakan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 3.1. Penskoran Tugas Mandiri 3.1 Soal nomor 1 mendapat skor 6 dan soal nomor 2 memperoleh skor 4, sehingga skor maksimal 10. Nilai = Skor Perolehan 10×100

Daftar Pustaka

1. Buku Siswa kelas IX . Pendidikan Pancasila Dan kewarganegaraan, Jakarta pusat Kurikulum dan perbukuan,Balitbang Kemendikbud 2018
2. Buku Guru kelas IX. Pendidikan Pancasila Dan kewarganegaraan, Jakarta pusat

Lampiran 3. Media

Sekolah	:	SMP NU 07 BRANSGONG
Mata Pelajaran	:	PPKn
Kelas/Semester	:	IX./1 GANJIL
Kompetensi Dasar	:	1.3 hakikat dan teori kedaulatan
Materi	:	Hakikat, teori, sifat dan macam kedaulatan
Alokasi Waktu	:	3X40 menit Pelajaran/ TATAP MUKA
Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	
1. 3 hakikat dan teori kedaulatan	Peserta didik dapat menelaah hakikat, teori, sifat dan macam kedaulatan	
Tujuan Pembelajaran : Melalui model pembelajaran Problem Based Learning peserta didik dapat menelaah hakikat, teori sifat dan macam kedaulatan		
materi : Hakikat, teori, sifat dan macam kedaulatan		
Jenis Media Yang Dikembangkan Youtube		
Bahan dan alat yang dibutuhkan komputer buku ajar buku tulis bolpoin internet		
Link Media yang Dikembangkan (google drive) https://youtu.be/34459p58ox8		

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan 4
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET



Lampiran 4. Instrumen Penilaian

Sekolah	:	SMP NU 07 BRANGSONG
Mata Pelajaran	:	PPKn
Kelas/Semester	:	VIII/II
Kompetensi Dasar	:	1.3. hakikat dan teori kedaulatan
Materi	:	Hakikat teori , bentuk dan macam kedaulatan
Alokasi Waktu	:	3x 40 menit Pelajaran

A.Kisi-Kisi

Kisi-kisi Penilaian Pengetahuan

No	Kompetensi Dasar	Kelas	Materi	Indikator Pencapaian Kompetensi	Level Kognitif	No Soal	Bentuk Soal
1							

Kisi-kisi Penilaian Sikap

No	Kompetensi Dasar	Kelas	Indikator Pencapaian Kompetensi	Aspek sikap	Skor/ Kriteria	Teknik Penilaian
	1.6	IX	Ada tidaknya kejadian yang luar biasa, baik kejadian yang sifatnya positif maupun negatif	Negative atau positive	-	catatan

Kisi-kisi Penilaian Keterampilan



No	Kompetensi Dasar	Kelas	Indikator Pencapaian Kompetensi	Aspek Psikomotor	Skor/ Kriteria	Teknik Penilaian
	1.6	IX	Peserta didik dapat menyusun pertanyaan, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi yang berkaitan dengan makna Hakikat Kedaulatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. bertanya 2. menjawab 3. memberi usulan 	terlampir	dinilai dengan angka

B. Instrumen

C. Pedoman Penskoran

Nilai : $\frac{\text{Skor perolehan}}{\text{Skor Total}} \times 100 =$

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan 4
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

